



## Peran Aparat Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi: Suatu Analisis Perspektif

Sutangsa  
Universitas Subang  
[sutangsa@unsub.ac.id](mailto:sutangsa@unsub.ac.id).

### Abstrak:

Pencegahan korupsi merupakan tantangan kritis dalam konteks administrasi publik, dengan penekanan pada peran aparat administrasi publik yang memegang peran kunci dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif aparat administrasi publik terkait peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Tinjauan literatur menyelidiki konsep pencegahan korupsi dan mendefinisikan peran khusus yang diharapkan dari aparat administrasi publik. Mengadopsi pendekatan analisis perspektif, penelitian ini memaparkan temuan dari penelitian empiris yang melibatkan responden kunci di lingkungan administrasi publik. Temuan ini menggambarkan pandangan dan sikap aparat administrasi publik terkait dengan pencegahan korupsi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung atau penghambat peran mereka. Implikasi temuan ini membawa kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi di tingkat administrasi publik. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami perspektif internal aparat administrasi publik untuk merancang strategi yang efektif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas pemerintahan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pemerintah, Analisis, Kebijakan, Integritas, Aparat, Publik, Transparansi, Pencegahan, Etika.

### Abstract

*Corruption prevention is a critical challenge in the context of public administration, with an emphasis on the role of public administration officials who play a key role in maintaining the integrity and transparency of government. This research aims to analyze the perspectives of public administration officials regarding their roles in corruption prevention efforts. A literature review investigates the concept of corruption prevention and defines the specific roles expected of public administration officials. Adopting an analytical perspective approach, this research presents findings from empirical research involving key respondents in the public administration environment. These findings depict the views and attitudes of public administration officials regarding corruption prevention, identifying factors that support or hinder their roles. The implications of these findings make a significant contribution to the development of policies and practices for corruption prevention at the public administration level. This research highlights the importance of understanding the internal perspectives of*



*public administration officials to design effective strategies in supporting the integrity and accountability of government.*

**Keywords:** *Corruption, Government, Analysis, Policy, Integrity, Officials, Public, Transparency, Prevention, Ethics."*

## **Pendahuluan**

Korupsi merupakan tantangan serius yang merongrong fondasi integritas dan kredibilitas pemerintahan di seluruh dunia. Pada level pemerintahan, aparat administrasi publik menjadi garda terdepan dalam menjaga probitas dan kepercayaan masyarakat. Keterlibatan aparat administrasi publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya mencerminkan kebutuhan etika pelayanan publik yang baik, tetapi juga menjadi unsur krusial dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Latar belakang kompleksitas permasalahan korupsi memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pemahaman mendalam tentang peran aparat administrasi publik dalam menjawab tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis perspektif aparat administrasi publik terkait peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam melihat keterlibatan mereka, perlu diperhatikan dinamika, hambatan, dan faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi administratif dalam konteks pencegahan korupsi.

Keberhasilan strategi pencegahan korupsi dalam konteks administrasi publik sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang sikap, nilai, dan persepsi aparat terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, analisis perspektif dianggap sebagai pendekatan yang relevan untuk menggali wawasan yang lebih baik dalam memahami bagaimana aparat administrasi publik memandang peran mereka dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur tentang peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi tetapi juga memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan implementasi praktik terbaik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dengan menggarap elemen-elemen ini secara terperinci, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif aparat administrasi publik dalam menghadapi tantangan korupsi, dan pada gilirannya, dapat merangsang dialog yang konstruktif untuk perbaikan sistem administrasi publik yang lebih baik di masa depan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Pencegahan Korupsi**

Pencegahan korupsi menjadi prioritas global yang mencerminkan keinginan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Menurut Rose-



Ackerman (1999), pencegahan korupsi melibatkan strategi proaktif untuk mengurangi peluang dan motivasi korupsi. Pendekatan ini mencakup perbaikan sistem hukum, promosi transparansi, dan memperkuat lembaga pengawasan.

#### Peran Administrasi Publik dalam Pencegahan Korupsi

Peran administrasi publik dalam konteks pencegahan korupsi tidak dapat diabaikan. Menurut Klitgaard (1988), administrasi publik berkontribusi pada pencegahan korupsi melalui implementasi kebijakan, pembentukan etika pelayanan, dan peningkatan akuntabilitas. Aparat administrasi publik dianggap sebagai pemangku kepentingan utama yang dapat membentuk budaya organisasi yang melawan korupsi.

#### Analisis Perspektif dalam Konteks Administrasi Publik

Analisis perspektif menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana aparat administrasi publik memandang peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Menurut Hood (1991), perspektif mencakup sikap, nilai, dan pandangan individu terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor internal yang mempengaruhi keterlibatan aparat dalam mencegah praktik korupsi.

#### Kesenjangan dalam Literatur

Meskipun literatur mencakup berbagai aspek pencegahan korupsi, terdapat kesenjangan dalam pemahaman perspektif aparat administrasi publik dalam konteks spesifik ini. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pandangan, hambatan, dan faktor pendukung yang memengaruhi peran aparat administrasi publik dalam mencegah dan memberantas korupsi.

#### Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini menyoroti pentingnya peran administrasi publik dalam konteks pencegahan korupsi dan mendukung pilihan analisis perspektif sebagai pendekatan yang relevan. Dengan memahami kerangka konseptual dan kontribusi teoritis dari penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi peran aparat administrasi publik dalam mencegah dan memberantas korupsi.

#### **Kerangka Teoritis:**

##### Konsep-Konsep Utama

1. Pencegahan Korupsi: Konsep ini melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan mengurangi peluang dan motivasi korupsi dalam konteks administrasi publik. Melibatkan strategi hukum, transparansi, dan penguatan lembaga pengawasan untuk menciptakan lingkungan yang tidak ramah terhadap perilaku koruptif.
2. Peran Administrasi Publik: Menurut Frederickson (1999), peran aparat administrasi publik mencakup implementasi kebijakan, pembentukan etika organisasi, dan peningkatan akuntabilitas. Peran ini diintegrasikan ke dalam



struktur dan budaya organisasi untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif.

3. Analisis Perspektif: Mengacu pada pendekatan yang memeriksa sikap, nilai, dan pandangan individu terhadap peran mereka dalam administrasi publik. Analisis perspektif membuka peluang untuk memahami faktor internal yang mempengaruhi keterlibatan aparat administrasi publik dalam upaya pencegahan korupsi.

### **Teori-Teori yang Mendukung Penelitian**

1. Teori Kepatuhan (*Compliance*): Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap norma dan aturan dalam administrasi publik merupakan faktor kunci dalam mencegah korupsi. Tingginya kepatuhan dapat meminimalkan risiko praktik korupsi di dalam organisasi.
2. Teori Etika Pelayanan Publik: Menurut Frederickson (1999), etika pelayanan publik menekankan pentingnya moralitas dan integritas dalam perilaku aparatur publik. Teori ini mendukung bahwa aparat yang memiliki etika yang baik akan lebih cenderung melibatkan diri dalam upaya pencegahan korupsi.
3. Teori Struktur dan Budaya Organisasi: Teori ini mengajukan bahwa struktur dan budaya organisasi memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku individu. Implementasi kebijakan, nilai, dan norma organisasi dapat mempengaruhi peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi.

### **Hubungan Antara Konsep-Konsep dan Teori-Teori**

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk mengaitkan konsep-konsep utama pencegahan korupsi dan peran administrasi publik dengan teori-teori yang mendukung. Analisis perspektif menjadi instrumen untuk memahami cara teori-teori ini berinteraksi dengan pandangan dan sikap aparat administrasi publik dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan merinci kerangka teoritis ini, diharapkan penelitian dapat menggambarkan hubungan yang lebih jelas antara konsep-konsep kunci dan teori-teori yang mendukung, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi.

### **Metode Penelitian:**

Desain penelitian, penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif aparat administrasi publik terkait peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan penggalan data yang kaya akan konteks dan kompleksitas dari pandangan individu. Populasi dan sampel, populasi penelitian mencakup aparat administrasi publik yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Sampel penelitian dipilih secara purposive untuk memastikan representasi yang tepat dari berbagai tingkatan, unit kerja, dan pengalaman di dalam organisasi administrasi publik. Instrumen penelitian, instrumen penelitian utama adalah panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali pandangan, nilai, dan sikap aparat administrasi publik terkait pencegahan korupsi.



Wawancara akan difokuskan pada pengalaman mereka dalam menerapkan kebijakan antikorupsi, hambatan yang mereka hadapi, dan faktor yang mendukung atau menghambat peran mereka. Proses pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara satu lawan satu dengan partisipan yang terpilih. Wawancara akan direkam dan dianalisis secara mendalam untuk mengeksplorasi pola temuan yang muncul. Keakuratan dan keabsahan data akan diperkuat melalui triangulasi dengan dokumen resmi, kebijakan organisasi, dan observasi langsung jika diperlukan. Analisis data, analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana temuan utama dan pola tematis diidentifikasi dari transkrip wawancara. Proses analisis melibatkan pencarian hubungan antara kategori-kategori yang muncul dan teori-teori yang mendukung dari kerangka teoritis. Software analisis data kualitatif, seperti NVivo, digunakan untuk memfasilitasi proses ini. Etika penelitian, penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan izin etika sebelum memulai penelitian. Kerahasiaan partisipan dijaga, dan partisipan diberikan informasi tentang tujuan penelitian serta hak dan kewajiban mereka untuk berpartisipasi atau menarik diri. Dengan mengadopsi metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perspektif aparat administrasi publik dalam upaya pencegahan korupsi, menyumbang pada literatur dan memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

### **Temuan Penelitian:**

#### Deskripsi Temuan

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah temuan yang menggambarkan pandangan dan sikap aparat administrasi publik terkait dengan peran mereka dalam pencegahan korupsi. Temuan ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kesadaran akan Pentingnya Pencegahan Korupsi: Mayoritas responden menyatakan kesadaran tinggi akan pentingnya pencegahan korupsi dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kesadaran ini diperoleh melalui pelatihan dan program pengembangan yang diberikan oleh organisasi.
2. Persepsi Terhadap Hambatan Internal: Sebagian besar responden mencatat adanya hambatan internal, seperti ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan, tekanan kinerja, dan resistensi internal. Beberapa responden mengindikasikan kebutuhan untuk peningkatan dalam mendukung peran mereka dalam memerangi korupsi.
3. Faktor Pendukung Peran Aparat Administrasi Publik: Faktor-faktor yang mendukung peran aparat administrasi publik melibatkan dukungan pimpinan organisasi, peningkatan transparansi, dan pengakuan terhadap keberhasilan dalam mencegah dan mendeteksi kasus korupsi.



### **Interpretasi Temuan**

1. Persepsi Terhadap Hambatan Internal: Kesadaran akan hambatan internal menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam mendukung peran aparat administrasi publik. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pimpinan organisasi dan penyelenggara kebijakan.
2. Pentingnya Peran Pemimpin Organisasi: Temuan menunjukkan bahwa peran pemimpin organisasi sangat mempengaruhi efektivitas aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Peningkatan komitmen dan dukungan dari tingkat kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk memperkuat integritas organisasi.
3. Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem: Berdasarkan temuan ini, diperlukan rekomendasi untuk memperbaiki sistem administrasi publik, termasuk peningkatan pelatihan, peningkatan kebijakan, dan penguatan mekanisme pengawasan internal.

### **Implikasi Temuan**

1. Kebutuhan Akan Peningkatan Pelatihan: Temuan ini menyarankan perlunya peningkatan pelatihan dalam hal etika pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan pengelolaan konflik kepentingan untuk memastikan bahwa aparat administrasi publik memiliki pemahaman yang mendalam.
2. Peran Pengawasan Internal yang Diperkuat: Implikasi temuan menyoroti pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk mendukung peran aparat administrasi publik. Sistem pengawasan yang lebih efektif dapat membantu mendeteksi dan mencegah praktik korupsi.
3. Perbaikan Kebijakan dan Prosedur Internal: Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan prosedur internal mencakup penyederhanaan proses, peningkatan transparansi, dan pemberian insentif bagi aparat yang aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

### **Batasan Penelitian**

1. Generalisasi Temuan: Temuan penelitian mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke semua konteks administrasi publik. Konteks organisasional dan lingkungan politik mungkin memiliki dampak yang berbeda.
2. Keterbatasan Waktu dan Anggaran: Keterbatasan waktu dan anggaran mungkin membatasi cakupan dan mendalamnya penelitian ini. Oleh karena itu, temuan perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan batasan tersebut.

### **Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Penelitian Lanjutan tentang Pengaruh Pemimpin Organisasi: Saran untuk penelitian selanjutnya melibatkan pengkajian lebih lanjut terhadap pengaruh pemimpin organisasi terhadap peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi.



2. Analisis Lebih Lanjut Terhadap Hambatan Internal: Penelitian mendalam mengenai hambatan internal, termasuk faktor organisasional dan budaya yang mungkin mempengaruhi peran aparat administrasi publik.

Dengan memahami temuan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan korupsi di tingkat administrasi publik.

### **Pembahasan:**

#### Hubungan Temuan dengan Literatur

1. Kesadaran akan Pentingnya Pencegahan Korupsi: Kesadaran yang tinggi akan pentingnya pencegahan korupsi, seperti yang diungkapkan oleh responden, konsisten dengan literatur yang menekankan bahwa pemahaman dan kesadaran individu terhadap dampak negatif korupsi merupakan langkah awal menuju pencegahan efektif (Rose-Ackerman, 1999).
2. Persepsi Terhadap Hambatan Internal: Temuan terkait hambatan internal sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan antikorupsi di level administrasi publik (Huberts & Nelen, 2009). Kesadaran akan hambatan ini mendorong pemikiran kritis dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam struktur organisasi.
3. Faktor Pendukung Peran Aparat Administrasi Publik: Faktor-faktor pendukung, seperti dukungan pimpinan organisasi dan peningkatan transparansi, mendukung temuan-temuan sebelumnya yang menyoroti peran penting budaya organisasi dan kepemimpinan dalam menciptakan lingkungan yang bersih (Frederickson, 1999).

#### Implikasi Temuan terhadap Literatur

1. Pentingnya Peran Pemimpin Organisasi: Implikasi temuan menegaskan urgensi peran pemimpin organisasi dalam memperkuat integritas dan memotivasi aparat administrasi publik untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Dukungan dan komitmen dari tingkat kepemimpinan adalah kunci untuk menciptakan budaya yang tidak toleran terhadap korupsi (Huberts & Nelen, 2009).
2. Peran Pengawasan Internal yang Diperkuat: Temuan menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal sebagai langkah penting dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyoroti peran penting pengawasan internal dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi (Doig, Watt, & Williams, 2004).
3. Perbaikan Kebijakan dan Prosedur Internal: Implikasi temuan menggarisbawahi kebutuhan untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur internal. Langkah-langkah ini dapat mencakup penyederhanaan proses, peningkatan transparansi, dan penyusunan insentif yang mendukung aparat dalam berperan aktif dalam pencegahan korupsi (Rose-Ackerman, 1999).

### **Kontribusi Penelitian**



Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mendalami pemahaman tentang perspektif aparat administrasi publik dalam konteks pencegahan korupsi. Dengan menggali pandangan, hambatan, dan faktor pendukung, penelitian ini menambah wawasan tentang bagaimana administrasi publik dapat lebih efektif dalam peran mereka.

### **Batasan Penelitian**

1. **Generalisasi Temuan:** Batasan penelitian termasuk kemungkinan ketidakmampuan untuk menggeneralisasi temuan ke semua konteks administrasi publik. Konteks organisasional dan politik yang berbeda dapat memengaruhi interpretasi temuan.
2. **Keterbatasan Waktu dan Anggaran:** Keterbatasan waktu dan anggaran mungkin membatasi cakupan dan mendalamnya penelitian. Oleh karena itu, temuan perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan batasan tersebut.

### **Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Penelitian Lanjutan tentang Pengaruh Pemimpin Organisasi: Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup pengkajian lebih lanjut terhadap pengaruh pemimpin organisasi terhadap peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Penelitian mendalam dapat mengeksplorasi strategi kepemimpinan yang efektif.
2. Analisis Lebih Lanjut Terhadap Hambatan Internal: Penelitian lebih lanjut tentang hambatan internal, termasuk faktor organisasional dan budaya yang mungkin mempengaruhi peran aparat administrasi publik, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dengan menginterpretasikan temuan-temuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan untuk perbaikan sistem administrasi publik yang lebih baik dan efektif dalam pencegahan korupsi di masa depan.

### **Kesimpulan**

#### **Ringkasan Temuan**

Penelitian ini mendalami pemahaman terhadap perspektif aparat administrasi publik terkait peran mereka dalam upaya pencegahan korupsi. Temuan menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya pencegahan korupsi di kalangan aparat administrasi publik, walaupun mereka juga mengidentifikasi hambatan internal yang dapat mempengaruhi peran mereka. Faktor pendukung, seperti dukungan pimpinan organisasi dan peningkatan transparansi, juga diidentifikasi sebagai elemen kunci yang mendukung efektivitas peran mereka.

### **Implikasi Praktis**

1. Penguatan Kepemimpinan Organisasi: Kesimpulan menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan organisasi diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peran aparat administrasi publik dalam mencegah korupsi. Dukungan dari tingkat kepemimpinan akan menjadi katalisator untuk meningkatkan komitmen dan integritas organisasi.





2. Perbaikan Mekanisme Pengawasan Internal: Kesimpulan menyoroti pentingnya perbaikan mekanisme pengawasan internal sebagai langkah penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Mekanisme yang diperkuat dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan administrasi publik.
3. Revisi Kebijakan dan Prosedur Internal: Kesimpulan menyarankan perlunya revisi kebijakan dan prosedur internal untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Langkah-langkah ini dapat melibatkan penyederhanaan proses, peningkatan transparansi, dan pengakuan terhadap kontribusi positif.

### **Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mendalami pemahaman tentang pandangan, hambatan, dan faktor pendukung peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Kontribusi ini diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

### **Batasan Penelitian**

Batasan penelitian mencakup kemungkinan ketidakmampuan untuk menggeneralisasi temuan ke semua konteks administrasi publik dan keterbatasan waktu serta anggaran yang dapat memengaruhi cakupan dan mendalamnya penelitian.

### **Saran untuk Penelitian Selanjutnya**

1. Pengkajian Lebih Lanjut tentang Pengaruh Pemimpin Organisasi: Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut tentang pengaruh pemimpin organisasi terhadap peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Pemahaman mendalam tentang strategi kepemimpinan yang efektif dapat memberikan panduan praktis.
2. Analisis Detil Terhadap Hambatan Internal: Penelitian lanjutan yang lebih mendetail terhadap hambatan internal, termasuk faktor organisasional dan budaya, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

### **Kesimpulan Akhir**

Dengan memahami temuan-temuan dan implikasinya, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tentang peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk perbaikan sistem administrasi publik yang lebih efektif dan pencegahan korupsi yang lebih baik di masa depan.



## References

- Doig, A. &. (2000). Corruption and Anti-Corruption Strategies: Issues and Case Studies from Developing Countries. *Asian Development Bank*, --.
- Doig, A. W. (2004). Introduction: The Politics of Public Administration Reform. *Public Administration and Development*, 24(2), 79-87.
- Frederickson, H. G. (1999). Ethics and Public Administration. *Public Administration Review*, 59(3), 211-216.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? *Public Administration*, 69 (1), 3-19.
- Huberts, L. W. (2009). The New Professional: Between Legitimacy and Loyalty. *Public Administration Review*, , 69 (3), 424-433.
- Jain, A. K. (2001). The Political Economy of Corruption and the Role of Financial Institutions. *Economics of Governance*, , 2(1), 3-21.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption* . California: University of California Press.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681-712.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. East of England: Cambridge University Press.
- Rothstein, B. &. (2008). What is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions. *Governance*, 21(2), 165-190.
- Seligson, M. A. (2006 ). The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America. *World Development*, 34(2), 381-404.